



Tak Ada Tempat Membuang

■ Pintu Depo Sampah Tertutup Rapat

YOGYA, TRIBUN - Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan, Bantul berhenti beroperasi per 23 Juli hingga 5 September mendatang. Imbasnya, sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan depo di Kota Yogyakarta pun ditutup rapat dan tidak menerima alokasi sampah dari warga.

Kondisi ini membuat para penggerobak sampah yang sehari-harinya bertugas mengambil limbah dari lingkungan warga mengalami kebingungan. Bukan tanpa alasan,

● ke halaman 11



Enggak bisa ngatasi. Bingung, warga juga bingung. (TPA) Piyungan tutup, terus deponya juga ditutup. Lha, terus mau bagaimana lagi ini?

Purwanto
Penggerobak Sampah

Pemulung Kebingungan

SUASANA di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan pada Minggu (23/7) siang, berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi lalu lalang truk dari Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta untuk membuang ratusan ton sampah di sana. Kondisi seperti ini akan terus berlangsung hingga 5 September mendatang.

Selama ini, TPA Piyungan menjadi tempat penampungan produksi sampah dari tiga wilayah di DIY itu dengan total sampah rata-rata 600-700 ton

● ke halaman 11

Minimalkan Penumpukan

- Depo dan TPS di Kota Yogyakarta sudah tak menerima pembuangan sampah.
- DLHK DIY mengoptimalkan 64 Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R).
- Ini dilakukan untuk mencegah penumpukan di depo-depo selama 1,5 bulan ke depan.
- TPS3R adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
- Dengan TPS3R, maka pengelolaan sampah yang dihasilkan dalam satu kalurahan dapat dioptimalkan.
- Sisa sampah yang tidak dapat diolah oleh TPS3R dibantu pengolahannya oleh DLHK DIY dengan pemberian alat pengolahan sampah dan alat transportasi untuk mengangkut sampah.
- Kalurahan wajib mengeluarkan sampah dari masing-masing rumah tangga dalam kondisi terpilah.
- Pemerintahan Sleman, Bantul, dan Kota Yogya pun dituntut mencari cara dan lahan mengolah sampah masing-masing.

TRIBUN JOGJA/
SETYA KRISNA/NETI
KURMAMA
**TANPA
AKTIVITAS**
- Gunung
sampah di
TPA Piyungan,
Minggu (23/7).
Saat ini tak
ada aktivitas
pembuangan
sampah hingga
5 September
mendatang.



Tidak Ada Tempat

• Sambutan Hari 1

mereka telanjur mengambil sampah milik pelanggan-nya, namun tak ada tempat pembuangan yang tersedia karena sejumlah TPS serta depo ditutup.

Seorang penggerobak yang biasa membuang limbah di salah satu depo di Kota Yogyakarta, Purwanto, berjarak, per Sabtu (22/7/23) dia sudah tidak bisa lagi membawa sampah yang diangkut menuju TPS. Menurut dia, informasi mengenai penutupan TPA Pyungan cenderung mendadak, sehingga banyak warga yang belum mengerti. "Enggak bisa ngatasi. Bingung, warga juga bingung, (TPA) Pyungan ditutup, terus deponya juga ditutup. Uha, terus mau bagaimana lagi ini?" ucapnya.

Oleh sebab itu, para penggerobak sejauh ini mulai menyiasatiskan soal penutupan TPA Pyungan yang berlangsung selama 40 hari ke depan, supaya warga pun dapat menahan sampahnya di rumah. Pasalnya, dengan kondisi ran pelik seperti sekarang, dirinya pun tidak mau repot, karena tidak ada lagi tempat untuk membuang sampah warga. "Ya, biasanya ditampung sendiri-sendiri sekarang, tidak ada tempat buat membuangnya. Sehingga saya segera ada solusinya dari pemerintah," ucap Purwanto.

Dari pantauan Tribun Jogja di beberapa TPS besar di Kota Yogyakarta, antara lain, di sisi barat stadion Mandala Krida, Lempuyangan, dan Jalan Brigien Kartoso, tampak terbebas dari timbunan sampah. Aktivitas pemilahan sampah yang sehari-harinya dilakukan petugas di TPS pun tak terlihat karena memang tak terdapat limbah yang masuk.

Jangan panik
Merespons hal ini, Pemkot Yogyakarta pun berupaya mengaji lokasi untuk menampung sementara limbah warga. Penjabat Wali Kota Yoga, Singih Raharjo berujar, keputusan yang terkesan mendadak ini bakal segera disikapi agar tak menimbulkan kegelutuan di tengah masyarakat. Warga tidak perlu panik, lantaran pemkot sudah melakukan upaya-upaya mitigasi untuk mengantisipasi situasi darurat.

"Kami sebut mitigasi, ya, karena ini situasinya darurat. Yang kami lakukan nanti kemudian akan menjadi solusi," tuturnya, Minggu (23). "Kami terus melakukan koordinasi sana-sini. Harus diskusikan bersama. Ini keputusan mendadak, sehingga harus ada action jangka sangat pendek, pendek, menengah, dan panjangnya," imbuh Singih.

Salah satu langkah paling memungkinkan supra-

ya sampai yang diproduksi penduduk tidak menumpuk adalah dengan menyiapkan tempat pembuangan sementara. Pasalnya, jika penampungan sementara tak direalisasikan, penutupan TPA yang mencapai 40 hari berpotensi memberikan dampak serius. "Maka, akan kami siapkan tempat (penampungan) sementara, ini baru kita jajaki, mulai dari kemarin, ya, sampai dengan hari ini," tegas Pj Wali Kota.

Namun demikian, Singih belum bersedia menjelaskan secara rinci lokasi penampungan sementara yang tengah dijadii itu. Tetapi, melihat tingkat kepadatan dan luas wilayah Kota Yogyakarta yang sangat terbatas, sangat dimungkinkan lokasinya berada di luar kawasan perkotaan. "Ini menjadi bagian dari strategi yang kami lakukan. Yang penting selama 40 hari situasi persampahan kota terkendali dan tidak menumpuk," terangya.

Menurut Singih, tempat pembuangan sementara yang tengah disiapkan pemkot pun diupayakan punya kekuatan untuk menampung sampah dari masyarakat setidaknya hingga 5 September 2023. Tapi, dengan catatan, penduduk harus pakai dan turuti serta meminimalisasi produksi maupun pembuangan sampahnya.

"Kita berupaya tidak lahirnya satu tempat. Sehingga, nanti akan kita bagi. Ini sifatnya masih penampungan sementara, jangka pendek, ya," ungkapnya. "Karena (untuk) merealisasikan tempat pengolahan kita, kan, harus mempertimbangkan faktor lingkungan juga. Jangan sampai mencemari dan sebagainya, itu harus diper-timbangkan," urai Singih.

Sebagai informasi, meskipun gerakan zero sampah diwongkopi sudah dilaksanakan di Kota Yogyakarta sejak 1 Januari 2023, masih tersisa sekitar 212 ton sampah per hari yang dialokasikan menuju TPA Pyungan. Maka, ketika satu hari saja sampah di TPS tidak terangkut, ratusan ton limbah yang tersebar di penjuru Kota Pelajar bisa dipastikan menumpuk.

Optimalkan TPSR
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY akan mengoptimalkan 64 Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) guna mencegah penumpukan sampah di depo-depo selama 1,5 bulan ke depan.

Seperti diketahui, TPSR adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pendauran ulang skala kawasan. Masyarakat perlu melakukan pemilahan dahulu sebelum membuang sampah ke TPSR. Keberadaan TPSR diharapkan dapat

mengurangi sampah yang masuk ke TPA Pyungan. "Sekarang mau tidak mau kita kan dorong untuk mengelola dhu di sumber, artinya masyarakat harus disiplin untuk pilih sampah. Karena mau tidak mau, kalau tidak pilih sampah, ya, tidak selesai-selesai persoalan sampah itu," kata Kepala DLHK DIY Kuncoro Cahyo Ajij, Minggu (23/7).

Dengan adanya TPSR, maka pengelolaan sampah yang dihasilkan dalam satu kalurahan dapat dioptimalkan. Kemudian sisa sampah yang tidak dapat diolah oleh TPSR, maka akan dibantu pengolahannya oleh DLHK DIY dengan pemberian alat pengolahan sampah dan alat transportasi untuk mengangkut sampah. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi tumpukan sampah di tiap kalurahan.

"Prosesnya adalah desa atau kalurahan mempunyai kewajiban mengeluarkan sampah dari dapur ke depan pintu masing-masing rumah tangga secara terpisah. Kemudian akan kami bantu untuk ke TPSR, nanti akan selesai di TPSR," katanya.

Meski demikian, Kuncoro mengakui fasilitas TPSR masih kurang efektif untuk sampah. Layanan sampah yang masuk ke Pyungan. Jika dipersenentase, TPSR hanya mampu mengolah sekitar 30 persen sampah pada tiap kalurahan. Karena itu, tahun ini DLHK ini akan mengoptimalkan keberadaan TPSR, terutama yang berada di 10 kalurahan mandiri sampah. Kalurahan mandiri sampah terdapat di Kabupaten Bantul yakni di Kalurahan Wirokerten, Tamanan, Srigading, dan Srihardono. Sementara di Sleman ada di Kalurahan Sinduharjo, Sardonoarjo, Purtharjo, Purwomartani, Minomartani, dan Pandowoharjo. "Yang baru akan kita efektifkan sekitar 13-an mengingat anggarannya terbatas, jadi pelan-pelan yang ada di 10 desa itu," jelas Kuncoro.

Cari solusi konkret
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Huda Tri Yudianto menyatakan, kebijakan penanganan sampah di DIY saat ini terkesan mahal, rumit, dan beresiko tinggi. Selama ini sampah-sampah yang terkumpul di TPA Pyungan tidaklah dimusnahkan. "Masyarakat lokal menanggung risiko sampah se-DIY. Akibatnya, masyarakat lokal terganggu luar biasa. Ketika overloak lokasi tersebut, masyarakat se-DIY juga terganggu karena tidak bisa buang sampah seperti saat ini," katanya, Minggu (23/7). Menurut Huda, sampah dalam taraf tertentu harus dimusnahkan di lokasi yang tersebar di masing-masing daerah. Saat ini banyak sekali teknologi pemusnah sampah yang terjangkau dan bisa memusnahkan sampah secara massal. Alat untuk memusnahkan sampah tidak harus mahal. "Pemusnah sampah cari saja yang penting bersih, ramah lingkungan, memenuhi standar kesehatan dengan tujuan memusnahkan sampah, bukan membuat energi atau komoditas cangguh," jelasnya.

La sepakat jika banyak anak bangsa yang mampu menciptakan alat pengolahan dan pemusnah sampah dengan harga terjangkau. Misal alat seharga Rp30 sampai Rp50 miliar bisa memusnahkan sampah 300 meter kubik per hari dan semi portabel. Estimasi angka tersebut menurutnya mampu mengatasi masalah sampah di Kota Yogyakarta bertahun-tahun. Penggunaan teknologi tepat guna semacam itu diklaim Huda lebih efisien, baik dari segi pengadaan maupun operasional.

"Biaya transportasi bisa efisien digunakan sebagai biaya operasional alat. Tapi masyarakat tetap harus dibebani *tipping fee* supaya sadar sampah itu butuh biaya dan agar meminimalisir sampah. Layanan sampah oleh pemerintah pilih cara yang paling sederhana dan murah," ungkap Huda.

Pemborosan

Selain menyoroti skema pemerintah terkait pemilahan metode pengolahan sampah, Huda juga menyinggung perluasan lahan di TPA Pyungan. Upaya perluasan lahan ini dianggap sebagai pemborosan anggaran dan justru memunculkan masalah di kemudian hari. "Tahun ini dibangun perluasan TPST Pyungan pakat anggaran Rp90 miliar di luar tanah dan biaya operasional. Itu hanya bisa menampung tujuh bulan ke depan karena sampah tidak dimusnahkan. Setelah itu pasti masalah lagi," tegasnya.

Sama halnya rencana kebijakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang membutuhkan investasi pihak ketiga dengan biaya mencapai triliunan rupiah. "Kuncunya menurut saya musnahkan dan dekatkan. Teknologi dipakai sesuai standar saja tidak usah yang mahal. Sampah jangan dianggap komoditas ekonomi bisnis, mahal tapi sebagai resiko bersama yang butuh biaya pemusnahannya," sambung Huda.

Ia juga mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah secara permanen. Edukasi kepada masyarakat tetap wajib dilakukan untuk meminimalkan produksi sampah. Seperti optimalisasi pemanfaatan TPSR. (aka/tribunhda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005